



## REKONSTRUKSI DEMOKRASI INDONESIA: INTEGRASI POLIARKI ROBERT A.DAHL DAN NILAI-NILAI ISLAM

Amir Hamzah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Sharia and Law, Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta

Corresponding Author : [emirhamz67@gmail.com](mailto:emirhamz67@gmail.com)

### **Abstract :**

*This study aims to discuss the problems of democracy in Indonesia and then use Robert A. Dahl's thoughts and Islamic values in reconstructing Indonesian democracy. This study uses a philosophical-critical literature review approach to data collected through journals, books, and websites related to the discussion. The results of this study indicate that the Indonesian democracy index has decreased in recent years, Robert A. Dahl suggests the concept of polyarchy which includes ways to improve the democracy index as well as Islamic values. The conclusion in this study is that the democracy index can be improved by applying Robert A. Dahl's ideas and Islamic values, including Syuro, Al-'Adalah, and Al Musawah.*

**Keywords:** *Indonesian Democracy, Islamic Democracy, Polyarchy Robert A. Dahl*

### **Abstrak :**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai problematika demokrasi di Indonesia kemudian menjadikan pemikiran Robert A.Dahl dan nilai-nilai Islam dalam merekonstruksi demokrasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian Pustaka secara filosofis-kritis terhadap data yang dikumpulkan melalui jurnal, buku, dan website yang terkait dengan pembahasan. Adapun dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya indeks demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, Robert A.Dahl menyarankan konsep poliarki yang didalamnya terdapat cara untuk meningkatkan Indeks demokrasi begitu juga dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah indeks demokrasi bisa ditingkatkan dengan menerapkan gagasan Robert A.Dahl dan nilai-nilai keislaman yang diantaranya adalah Syuro, Al-'Adalah, dan Al Musawah.

**Kata Kunci:** *Demokrasi Indonesia, Demokrasi Islam, Poliarki Robert A. Dahl*

## PENDAHULUAN

Berbicara mengenai demokrasi tentunya kita berbicara mengenai sistem pemerintahan yang sudah lama terbentuk dalam sejarah sistem pemerintahan dunia. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan pertama kali diterapkan dalam lingkungan pemerintahan Athena Yunani kuno pada saat itu yang menerapkan sistem demokrasi langsung dimana setiap warga negara yang diakui oleh pemerintah berhak untuk mengemukakan pendapatnya secara langsung dimuka umum. Pada masa Yunani Kuno khususnya di Athena perkembangan sistem demokrasi dinilai berhasil menjadi sistem pemerintahan yang baik karena masyarakat Athena pada saat ini dapat berperan langsung dalam partisipasi politik tanpa adanya perwakilan seperti yang kita alami saat ini sehingga pada saat ini demokrasi diidentikkan dengan perdamaian, keadilan, serta kemakmuran rakyat Athena (Dadang Supardan,2015).

Pada era Modern ini, sistem demokrasi telah banyak digunakan dikalangan negara-negara besar yang diyakini akan mampu menjaga hak-hak rakyat didakamnya. Sebagaimana yang dilansir dari laman KPU Papua Pegunungan bahwasanya Asia mendominasi daftar negara demokrasi terbesar di Dunia. Sebagai bagian dari penganut sistem demokrasi, Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat demokrasinya ketiga di dunia setelah India dan Amerika. Capaian tersebut tidak muncul dalam proses yang singkat tetapi ia lahir dari rangkaian proses yang panjang dimana dalam sejarahnya demokrasi di Indonesia mengalami empat kali transisi perubahan (Sunarso,2015).

Belakangan ini, sebagaimana yang dilansir dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia bahwasanya pada tahun 2024 kemarin Indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan yang mencapai skor 6,44 dari skala tertinggi 10. Sehingga berdasarkan apa yang kemudian dilaporkan oleh The Economic Intelligence Unit (EIU) pada 2025 menyatakan bahwasanya Indonesia menempati peringkat ke-59 dari total 167 Negara. Yang menjadi tolak ukur penurunan demokrasi di Indonesia tersebut adalah ranah budaya politik, kebebasan sipil, proses elektoral dan pluralisme hingga partisipasi politik (Dian Kartika,2025). Sementara itu dalam penelitian lain, Freedom House menerangkan bahwasanya Indonesia saat ini mengalami penurunan indeks demokrasi yang dimana pada tahun 2019 Indonesia berada dalam posisi 62 poin tetapi pada dua atau tiga tahun belakangan ini Indonesia justru merosot ke-53 point dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (M.C.N. Willi, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga diatas tadi menerangkan penurunan indeks demokrasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah isu mengenai politik dinasti pada pemilu 2024, terbelenggunya kebebasan pers, partisipasi politik, hingga perlindungan terhadap kaum minoritas. Menurut hemat penulis pribadi penurunan indeks demokrasi yang dialami oleh Indonesia belakangan ini disebabkan juga oleh melemahnya suara rakyat yang diwakilkan oleh dewan perwakilan rakyat dimana sering terjadi antara apa yang diinginkan oleh rakyat sering kali berbeda dengan apa yang disampaikan atau aspirasikan oleh perwakilannya itu sendiri.

Melihat permasalahan yang sudah dipaparkan diatas maka dalam tulisan ini akan memberikan sebuah tawaran supaya bagaimana kemudian demokrasi di Indonesia bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi

pustaka (library research) yang bersifat filosofis-kritis, di mana literatur diperlakukan sebagai ruang dialektika untuk menggali hakikat makna secara mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan sumber literatur yang komprehensif, meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait yang relevan dengan objek formal penelitian. Peneliti memosisikan teks bukan sekadar sebagai data mati, melainkan sebagai subjek yang dibedah melalui teknik close reading dan analisis isi (content analysis) untuk mengungkap asumsi dasar serta struktur pemikiran di baliknya. Secara kritis, data yang terkumpul disintesis dan diinterpretasikan untuk menghasilkan konstruksi pemikiran yang segar dan kontekstual, melampaui sekadar deskripsi bibliografis menuju pemahaman esensial yang bersifat fundamental (Muhammad Zed,2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pintu Masuk Pembahasan Demokrasi**

Demokrasi tidak membicarakan sebuah konsep yang baru saja dibentuk. Demokrasi jika dilihat dalam bentang sejarah berdirinya, ia merupakan sebuah sistem pemerintahan yang sudah lama dibentuk. Keberadaan awal demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan lahir dari Athen pada saat ini. Meskipun mendapatkan kritikan dari beberapa Filsuf saat itu sebut saja Socrates, Plato, bahkan aristoteles, Demokrasi pada awal kelahirannya memberikan kesempatan penuh bagi warga negara athena untuk ikut serta dalam menyuarakan kebutuhan-kebutuhannya sebagai warga politik. Memang harus diakui bahwasanya pemerintah Athena pada saat itu mampu menjadi sebuah wadah untuk menjalankan sistem demokrasi yang baik bagi rakyatnya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari letak geografis kota Athena yang cenderung kecil dan memiliki rakyat yang tidak terlalu banyak sehingga demokrasi berjalan dengan langsung tanpa adanya perwakilan sebagaimana yang dirasakan saat ini.

Dalam demokrasi yang masyarakat alami saat ini tidak lagi mengenal istilah demokrasi langsung dalam demokrasi modern. Namun meskipun demikian esensi daripada jantung demokrasi harus tetap dijaga meskipun demokrasi modern lebih condong pada demokrasi perwakilan (Arif Wijaya,2014). Dalam demokrasi Modern hal-hak asasi manusia, kebebasan berpendapat tidak bisa terputus dari rantai demokrasi itu sendiri, kedaulatan ditangan rakyat harus tetap dijaga begitu juga dengan supermasi hukum harus diperkuat. (B.Hestu & C. Handoyo,2009). Konsep mengenai Negara Demokrasi juga dikemukakan oleh pakar Hukum Tata Negara Indonesia yaitu Profesor Jimly Asshiddiqie yang menjelaskan konsep negara demokrasi itu sendiri, menurutnya Negara demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat, beliau memosisikan gagasannya mengenai pemerintahan yang demokratik ketika pemerintahan tersebut memosisikan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat. (Jimly Asshiddiqie, 2006). Sementara itu pedapat hampir sama yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD mengenai konsep Negara Demokrasi,

menurutnya suatu negara dikatakan demokratis adalah ketika ia mampu menjaga ataupun melindungi hak-hak rakyatnya iya juga memaparkan bahwasanya ketika negara itu dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat maka negara itu bisa dikatakan negara yang demokratik. (Mahfud MD, 2000).

### **Demokrasi dalam pandangan Robert A.Dahl**

Dalam pemikiran kontemporer ini, teori mengenai demokrasi sudah banyak digagas dan ditulis oleh ilmuwan politik baik dari Timur maupun Barat. Diantara gagasan yang paling menonjol dari beberapa gagasan mengenai demokrasi kontemporer ini terdapat beberapa teori ataupun gagasan yang masih bertahan sampai saat ini yang salah satunya adalah pemikiran Robert A.Dahl mengenai teori poliarki demokrasi.

Dalam buku terkenalnya yang berjudul *On Democracy* (Yale University Press), Dahl memberikan tawarannya mengenai standarisasi demokrasi. Dahl menyadari bahwasanya untuk mencapai sebuah negara demokrasi ideal rasanya tidak mungkin akan tetapi dengan standarisasi yang ditawarkan Dahl mengharapkan sistem demokrasi sedikit tidak mendekati idelitasnya itu sendiri. Standarisasi yang dia tawarkan diantaranya adalah:

#### **1. Partisipasi Efektif**

Dalam Negara yang menganut sistem Demokrasi, hal yang paling diutamakan adalah peranan rakyat didalam Negara tersebut. Dalam Negara Demokrasi, Partisipasi politik menjadi bagian terpenting yang didalamnya masyarakat dapat berperan dalam menentukan arah kebijakan. Mariam Budiarto mendefinisikan partisipasi politik sebagai sebuah rangkaian kegiatan rakyat baik itu dalam konteks individu maupun kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam lingkungan politik. (Mari Budiarto:1977). Dalam Negara demokrasi, partisipasi politik menjadi tolak ukur tingkat demokratisasinya sebuah negara, apabila partisipasi masyarakat tidak diutamakan maka terdapat kecacatan demokrasi dalam negara tersebut.

Dalam *A Preface to Democratic Theory* (1956) buku yang terkenal yang ditulis oleh Robert A. Dahl menerangkan peranan Partisipasi Efektif guna melahirkan Negara yang demokratik. Dalam pandangan Dahl, mewujudkan demokrasi ideal adalah keinginan yang hampir bisa dikatakan mustahil akan tetapi ia menguraikan beberapa prinsip guna dalam mewujudkan demokrasi sehat yang diantaranya adalah partisipasi yang efektif. Demokrasi dalam pandangan Dahl bukan hanya berbicara mengenai Pemilu saja melainkan juga mengenai keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka mengawasi dan bahkan mengawal keputusan-keputusan pemerintah begitu pula sebaliknya pemerintah harus mampu menerima dan memenuhi hak-hak politik warga Negaranya.

#### **2. Persamaan Dalam Memberi Suara**

Suara rakyat dalam sistem negara demokrasi adalah asas yang tidak

bisa dipisahkan. Ia adalah bagian terpenting dalam negara demokrasi jika suara rakyat dikesampingkan maka demokrasi tersebut sudah tergolong dalam sebuah sistem demokrasi yang cacat. Sebagai bentuk dari negara demokrasi semua rakyat yang sudah diakui oleh negara memiliki persamaan hak suara begitu juga dengan kewajiban pemerintah adalah untuk memenuhi hak-hak yang sudah dimiliki oleh warga negara itu sendiri. Dalam bukunya yang berjudul “Polyarchy: Participation And Opposition”, Dahl menyatakan dengan tegas bahwasanya dalam menuju negara demokrasi yang ideal pemerintah seharusnya menjamin hak-hak yang sama kepada rakyatnya tanpa harus adanya kualifikasi atau perbedaan antara si kaya dengan si miskin ataupun sebagainya. (Robert A Dahl.).

Sebagai bentuk dalam memenuhi persamaan suara tersebut, maka pemilihan umum dalam negara demokrasi dalam pandangan Dahl tidak bisa dinafikan, Pemilu yang kita kenal dengan asas “Jurdil” harus tetap eksis dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilihan umum adalah sarana didalam mewujudkan asas-asas kedaulatan rakyat guna menjaga suara-suara rakyat itu sendiri.

Tetapi meskipun demikian, Robert A.Dahl tidak bisa menafikan bahwasanya dalam sebuah negara selalu ada perkumpulan-perkumpulan atau kelompok-kelompok yang senantiasa memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri sehingga hal inilah yang kemudian membuat hak-hak suara rakyat mengalami ketimpangan.

### 3. Pemahaman Yang Jernih

Mewujudkan pemimpin yang ideal rasanya sulit dalam negara demokrasi apabila warga negaranya tidak memiliki pemahaman yang jernih. Hal ini yang kemudian sudah disinggung oleh filsuf terdahulu seperti Socrates maupun Plato. Socrates menyatakan bahwasanya dalam suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi akan memungkinkan orang yang jahat atau pun orang yang bodoh akan memimpin suatu negara sebab dalam negara demokrasi suara mayoritaslah yang menjadi penentu siapa yang akan memimpin suatu negara maka dengan problematika seperti ini, diharapkan rakyat atau warga negara memiliki kemampuan ataupun kecerdasan dalam memilih atau menentukan pilihan dalam memilih pemimpin.

Robert A.Dahl juga menyinggung hal demikian, dalam teori demokrasi modern yang ideal, selain masyarakatnya harus diberikan hak suara yang sama serta partisipasi yang efektif warga negara harus memiliki kecerdasan atau pemahaman yang baik supaya demokrasi bisa berjalan mendekati keidealannya tersebut (Robert A.Dahl,1985) .

Robert A.Dahl memberikan sebuah definisi terhadap apa yang kemudian dimaksudkan dengan pemahaman yang jernih (Enlightened Understanding) bahwasanya dalam negara demokrasi warga negara berhak untuk mendapatkan akses pengetahuan yang luas guna mengetahui informasi bahkan pengetahuan guna memilih pemimpin yang terbaik. Disamping itu pula pendidikan terhadap warga negara haruslah bersifat

bebas yang kemudian dapat diakses tanpa harus ada kekangan dari pemerintah itu sendiri, warga negara diharapkan mampu berpikir kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh negara tersebut (David R. Mayhew, 2015).

#### 4. Melaksanakan pengawasan terhadap agenda pemerintah

Salah satu semboyan demokrasi yang populer adalah apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln yang mengatakan bahwasanya demokrasi adalah *Government from The Poeples, By The Poeples, for The Poeples* yaitu demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Makna ketika semboyan tersebut dapat dimaknai secara singkat bahwasanya kedaulatan tertinggi berada dalam genggaman rakyat (BP.Rahardi & Arlis Prayoga, 2023). Artinya bahwasanya negara tidak hanya berfungsi atau bertugas untuk menjamin apa yang kita sebut sebagai hak-hak rakyat untuk bersuara melainkan negara juga hadir dalam memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk ikut serta melaksanakan pengawasan terhadap apa yang akan menjadi agenda pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini konsep *check and balance* sangat diperlukan supaya demokrasi yang dijalankan oleh suatu negara menjadi demokrasi yang sehat.

yang mencolok dari apa yang dikenal sebagai demokrasi klasik dan modern terletak pada konsep pengawasannya, jika pada demokrasi pada abad klasik terutama pada awal diberlakukannya sistem demokrasi di Athena bagaimana rakyat dilibatkan secara merata dalam mengontrol untuk menjadi pengawas jalannya pemerintahan, sementara itu dalam sistem demokrasi modern yang diterapkan saat ini lebih menekankan pada demokrasi perwakilan yaitu dimana rakyat memiliki perwakilan atau orang-orang yang mereka pilih untuk diamanahkan menjadi pengawas kebijakan pemerintah yang kita kenal dengan istilah perwakilan rakyat.

Dalam gagasannya Dahl sepertinya khawatir dengan sistem demokrasi keterwakilan ini maka oleh sebab itu ia menekankan jika menginginkan demokrasi yang sehat maka rakyat harus diberikan kesempatan menjadi pengawas terhadap kebijakan-kebijakan oleh pemerintah itu sendiri. Dahl menerangkan bahwasanya demokrasi bukanlah hanya sekedar pemilu melainkan warga negara juga harus bisa mempengaruhi agenda kebijakan dari pemerintah.

#### Problematika Demokrasi Indonesia Beberapa Tahun Belakangan

Demokrasi dalam tatanan Negara Indonesia tidak mengalami sejarah yang singkat akan tetapi menempuh selang waktu yang amat panjang. Sejak berdirinya negara kesatuan republik Indonesia, para pendiri bangsa ini terus berusaha menemukan sistem terbaik bagi negara Indonesia demi mewujudkan suatu tatanan negara yang demokratis (Surya Muhammad Nur, 2019). Walaupun para pendiri bangsa ini sudah menyepakati bahwasanya Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang ideal yang sesuai dengan karakteristik Negara Indonesia, pencarian demokrasi yang ideal terus dikembangkan hingga dalam sejarahnya sistem demokrasi Indonesia mengalami empat kali perubahan mulai dari demokrasi parlementer hingga

era reformasi sampai saat ini (Arif Wijaya, 2014).

Walaupun telah mengalami perubahan yang cukup Panjang, sistem demokrasi Indonesia dalam sejarahnya selalu mendapatkan tantangan tersendiri, mulai dari tantangan ketidakcocokan terhadap realitas masyarakat Indonesia hingga tantangan terhadap perilaku pemangku kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Pada saat sebagaimana yang dituliskan dari hasil penelitian Freedom House mengenai indeks demokrasi Indonesia yang menurun maka sangat penting dalam tulisan ini untuk mengkaji permasalahan tersebut mulai dari kebebasan berpendapat, kurangnya partisipasi politik, hingga munculnya isu dinasti politik. Namun pada tulisan ini penulis akan menyederhanakan problematika demokrasi tersebut pada partisipasi politik.

### **Partisipasi Politik Indonesia**

Untuk mengukur tingkat partisipasi politik pada sebuah negara, maka yang harus diketahui terlebih dahulu apa itu partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dimaknai sebagai sebuah proses keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam mengikutik arus perjalanan politik mulai dari proses pemilihan umum, menentukan kebijakan hingga ikut serta dalam kontestasi politik (Yalvema, 2012). Partisipasi politik dapat dijadikan sebagai sebuah indikator meningkat atau menurunnya sebuah negara yang berlandaskan demokrasi, jika partisipasi politiknya meningkat maka meningkat pula indeks demokrasi suatu negara tersebut namun jika sebaliknya, masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik hingga menurunnya angka pemilih maka negara tersebut berada dalam kecacatan demokrasi.

Jika melihat sebuah partisipasi politik dari segi pemilihan umum, maka dalam konteks keIndonesiaan belakangan ini mengalami pasang surut, dalam beberapa tahun terakhir partisipasi pemilu di Indonesia tercatat bahwasanya pada tahun 2019-2024 partisipasi pemilu mencapai 81-82% yang didukung oleh keterlibatan generasi muda. Dalam peningkatan indeks partisipasi belakangan ini memang peranan anak muda sudah mulai melekat terhadap isu-isu politik terutama dalam menjaga demokrasi Indonesia tetap berjalan dengan sehat (M.Salisul Hakim, 2023).

Menurut hemat penulis bahwasanya partisipasi dalam lingkungan pemilihan umum tetap mengalami pasang surut yang tidak jauh bedanya antara penurunan partisipasi dan peningkatannya hal ini disebabkan oleh harapan masyarakat terhadap calon pilihannya sebagai wakil atau pemimpin dalam menegakkan pemerintahan yang lebih baik sehingga bagaimanapun konteksnya, pemilihan akan terus menjadi wadah partisipasi politik yang lebih tinggi dengan partisipasi politik lainnya.

Jika melihat dan mengoreksi kembali terhadap hasil penelitian dari The Economic Intelligence Unit (EIU) beserta Freedom House yang menyatakan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan hingga berada dalam kondisi demokrasi yang cacat dimana salah satu penyebabnya adalah minimnya partisipasi politik. Sementara itu dalam beberapa tahun

belakangan ini partisipasi politik di Indonesia terlebih khusus dalam konteks pemilu mengalami peningkatan, lalu yang menjadi pertanyaan adalah partisipasi dalam bidang apa yang menjadikan Indonesia mengalami kemerosotan indeks demokrasi?. Dalam negara demokrasi termasuk Indonesia, partisipasi politik tidak hanya berbicara mengenai pemilihan umum, namun dalam negara demokrasi, partisipasi dimaknai dalam lingkungan yang lebih luas yang diantaranya adalah partisipasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan menjalankan kepercayaan, hingga kebebasan untuk berpikir (Daren G.Lilleker & Bllur Askan Ozgul, 2022) .

Tingkat partisipasi politik dalam bidang pemilu mengalami peningkatan akan tetapi tentu ada sebuah pertanyaan apakah setelah pemilu berlangsung partisipasi politik tetap berjalan sebagai contoh melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan hingga kebebasan pers dalam meliput kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam ungkapan Komnas HAM, belakangan ini kebebasan pers di Indonesia mengalami kemerosotan yang cukup signifikan (Komnas Ham,2026). Kejahatan terhadap pers baru-baru ini sudah terjadi yang diantaranya adalah serangan terhadap pers yang meliput aksi Hari Buruh pada tanggal 1 Mei 2025 tahun kemarin tidak hanya itu kebebasan berpendapat juga mengalami ancaman yang cukup mengerikan, beberapa bulan belakangan ini sebgai masyarakat baik itu aktivis muda hingga influencer yang mengkritisi kebijakan pemerintah juga mengalami teror hingga intimidasi sebagaimana yang tgerjadi pada influencer atau youtuber Fery Irwandi hingga Sherly Annavita seorang influencer dari Aceh bahkan juga dialami oleh Ramon Doni Adam yang diteror menggunakan bangkai hewan serta surat yang tertuliskian ancaman.

Tidak hanya berada dalam lingkungan kebebasan pers, melemahnya demokrasi di Indonesia juga disebabkan oleh melemahnya fungsi lembaga perwakilan rakyat yang dimana tugas utamanya adalah untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan rakyat kini bergeser menjadi kepentingan partai hingga kepentingan Individu. Melemahnya fungsi DPR ini disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya adalah terikatnya dengan aturan atau AD/ART partai, kurangnya komunikasi antara DPR dengan rakyat yang diwakilkan hingga ketidak berpihakan DPR terhadap rakyat itu sendiri.

Dengan permasalahan tersebut, rakyat sudah tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap DPR. Puncak kemarahan rakyat Indonesia mulai dari aktivis muda hingga masyarakat pada belakangan ini adalah ketika demo yang terjadi pada bulan agustus 2025 tahun kemarin. Demo yang disebabkan oleh salah satunya sikap arogansi DPR Tersebut mengalami puncak kemarahan masyarakat sipil pada pembakaran gedung DPR yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dengan adanya permasalahan seperti ini menunjukkan bahwasanya kepercayaan rakyat terhadap DPR yang diberi amanah sebagai penyeimbang lidah masyarakat sudah memudar dan kegagalan DPR dalam rangka menjalankan amanah

yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri.

## **Sebuah Tawaran Untuk Demokrasi Yang Lebih Sehat**

### **Sebuah Tawaran Dari Robert A.Dahl**

Jika berpaku terhadap hasil dari pada apa yang dikemukakan oleh The Economic Intelligence Unit (EIU) pada 2025 dan Freedom House mengenai kemunduran demokrasi di Indonesia yang salah satu penyebabnya adalah minimnya partisipasi politik itu sendiri. Robert A. Dahl memberikan solusi dalam konsep Poliarki bahwasanya meskipun demokrasi yang ideal tidak dapat dijalankan sepenuhnya setidaknya ada beberapa langkah supaya demokrasi mendekati keidealitasannya tersebut. Sebagai tawaran utama Robert A. Dahl menawarkan bahwasanya agar demokrasi berjalan sehat partisipasi publik yang efektif harus diutamakan. Robert A. Dahl meninggung bahwasanya partisipasi politik yang melibatkan rakyat didalamnya tidak hanya berlangsung pada proses pemilihan umum saja melainkan partisipasi tersebut harus berjalan dan menjadi poin utama dalam demokrasi.

Apa yang kemudian dialami oleh Indonesia saat ini adalah bagian dari pada kemunduran demokrasi tersebut hal ini terlihat dari partisipasi politik yang hanya berjalan lima tahun sekali yaitu ketika pemilihan umum berlangsung. Demokrasi di Indonesia saat ini menandakan bahwasanya demokrasi tersebut berada dalam posisi tidak sehat, sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam problematika demokrasi di Indonesia, saat ini kritikan yang ditujukan kepada pemerintah dianggap sebagai sebuah ujaran kebencian bahkan penghinaan sehingga banyak diantara para pengkritik tersebut mendapatkan peneroran atas apa yang dilakukan. Dengan posisi demokrasi yang lemah seperti ini konsep poliarki yang digagas oleh Robert A. Dahl bisa menjadi salah satu pijakan guna dalam menyehatkan kembali indeks demokrasi Inonesia. Dalam konteks saat ini salah satu yang menjadi tawaran adalah memberikan ruang bagi rakyat sipil guna berperan langsung menjadi penyeimbang kekuasaan dengan salah satu caranya adalah memberikan kebebasan kepada pers dan masyarakat sipil dalam mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Selain menitik beratkan konsep poliarkinya pada partisipasi yang efektif, Dahl juga menegaskan bahwasanya sehatnya demokrasi dilihat dari pemahaman yang jernih, dan keterlibatan rakyat dalam keputusan-keputusan agendar pemerintah baik pada proses pembuatan agenda hingga evaluasi kinerja pemerintah. Dalam sebuah negara demokrasi, pemberian hak suara dalam pemilhan umum jika tidak disertai dengan pemahaman yang jernih maka demokrasi tidak akan berjalan dengan sehat, ketika masyarakat berada dalam lingkungan yang tidak memahami bahkan tidak peduli dengan politik maka akan terlahir pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel atau berkualitas. Pemberian hak suara yang setara tidak lantas menjadikan demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang sehat, pemerintah harus

terlibat dalam memberikan pemahaman yang jernih pada masyarakatnya guna melahirkan sosok pemimpin yang berkualitas.

### **Sebuah Tawaran Dari Nilai-Nilai KeIslaman**

Islam adalah agama yang luas didalam ajarannya manusia tidak hanya diajarkan bagaimana berhubungan dengan Tuhannya melainkan manusia sebagai makhluk sosial diajarkan bagaimana manusia tersebut bisa berintraksi dengan sesama manusia lainnya. Islam adalah agama yang universal yang didalamnya tidak hanya mengkaji mengenai ibadah surga dan neraka saja tetapi Islam hadir sebagai sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada termasuk permasalahan dalam bidang politik.

Didalam Al-Qur'an sendiri banyak sekali ayat-ayat yang tidak hanya membahas konsep ibadah saja tetapi juga membahas perilaku politik dalam hal ini demokrasi. Jika melihat ayat suci Al-Qur'an Surat Ali Imran 159 dan Al-Syura 38 maka dalam kedua surat tersebut menerangkan konsep ataupun nilai-nilai demokrasi yang didalamnya mengedepankan konsep musyawarah. Dalam Islam konsep demokrasi meliputi beberapa elemen yaitu:

*Pertama Syuro*, yaitu sebuah prinsip dalam Islam yang mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, dala Al Qur'an sendiri sudah dijelaskan dalam surat As-Syuro ayat 15 yang menerangkan bahwasanya dalam mencapai sebuah keputusan maka yang diutamakan adalah musyawarah dengan melibatkan orang-orang yang terkait dalam permasalahan yang ingin diputuskan. Apa yang dialami oleh demokrasi Indonesia saat ini menyimpang dalam konsep syuro yang ditawarkan oleh Islam, para pemangku kebijakan ataupun penyambung lidah masyarakat dalam hal ini DPR tidak sepenuhnya menjalankan konsep musyawarah pada masyarakat, DPR hari ini yang diharapkan mampu menjadi penyambung lidah masyarakat justru terkesan tidak merepresntasikan hal demikian, anggota dewan perwakilan rakyat hanya turun kelapangan ketika proses pemilu sudah dekat bahkan segala keputusannya lebih mendekati keinginan partai dari pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Adanya ketidak cocokan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat dibawah juga menunjukkan bahwasanya dalam mengambil keputusan pemerintah sering tidak melibatkan masyarakat secara langsung sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat berbeda dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah.

*Kedua Al-'Adalah* yaitu sebuah konsep dimana keadilan harus diutamakan tanpa melihat setatus kedudukan manusia. Al-Qur'an banyak menegaskan bahwasanya bangsa akan mendekati ambang kehancuran ketika keadilan tidak mampu untuk ditegakkan. Konsep Al-'adalah diharapkan mampu kemudian menjadi solusi mengenai keadaan yang dialami Indonesia saat ini.

*Ketiga Al-Musawah* yaitu sebuah konsep dimana Islam mengedepankan kesejajaran, artinya walaupun Indonesia memiliki beragam suku,budaya,adat, bahkan agama yang berbeda mereka tidak boleh untuk

didiskriminasi, dalam konsep Al-Musawah ini menjelaskan bagaimana kemudian dalam partisipasi politik, pemerintah tidak boleh mengedepankan kelompok-kelompok tertentu tetapi pemerintah harus mampu menjaga hak-hak yang sama bagi seluruh warga negara, pemerintah harus menjalankan kewajibannya untuk melindungi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi terlebih lagi pada minoritas.

Nilai-nilai demokrasi yang bersumber dalam Islam semestinya dijalankan oleh pemerintah guna meningkatkan demokrasi Indonesia menjadi sebuah demokrasi yang sehat. Dengan menjalankan konsep musyawarah, konsep keadilan, hingga konsep kesejajaran tersebut partisipasi politik dari pemerintah untuk rakyat bisa berjalan dengan sehat sehingga dengan hal demikian yang harus berpartisipasi terhadap politik bukan hanya masyarakat saja melainkan pemerintah juga harus berpartisipasi dengan memberikan hak-hak yang sama, menjalankan kewajiban terhadap rakyat tanpa memandang bulu hingga berlaku adil dalam memutuskan sebuah kebijakan.

## **KESIMPULAN**

Indonesia pada saat ini mengalami penurunan indeks demokrasi yang penyebab utamanya adalah minimnya partisipasi politik. Dengan melihat penyebab utama tersebut maka dalam hal ini konsep poliarki yang dituangkan oleh Robert A. Dahl yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keIslaman diharapkan mampu menjadi sebuah solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut. Konsep yang ditawarkan oleh Robert A. Dahl adalah partisipasi yang efektif, pemahaman yang jernih, hingga keterlibatan masyarakat dalam agenda pemerintah. Sedangkan dalam Islam, konsep yang ditawarkan adalah dengan menjalankan tiga pilar yaitu musyawarah, keadilan, dan kesejajaran.

## **REFERENCES**

- Arif, W.(2014). Demokrasi Dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Al-Daulah, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4, (1), 128.  
<https://share.google/cwqWumOWDzKcxg4hd>
- Dadang, S. (2015), Sejarah Dan Prospek Demokrasi, Jurnal Sosio Didaktika: Social Science Education, 2, (2), 126.
- Darren, G.L.& Billur, A.O.(2022). The Psychology Of Democracy, Rautledge, 137.
- David, R.M. (2015). Robert A.Dahl: Question, Concepts, Proving it. Departmen of Political Science. YaleUniversity, New Have. CT. USA. 3.
- Hestu, B & Handoyo, C. (2009). Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta, UAJY, 383
- Hidayat, A. (2026). Kebebasan Pers Memburuk: Komnas HAM ungkap Intimidasi Terhadap Jurnalis Yang Kian Sistematis.  
<https://dewanpers.or.id/read/news/20-01-2026-kebebasan-pers->

memburuk-komnas-ham-ungkap-intimidasi-terhadap-jurnalis-kian-sistemik

- Jimly, A. (2006). Hukum Tata Negara San Pilar Pilar Demokrasi. Jakarta, Konstitusi Perss, 78.
- Mahfud, M.D. (2003). Demokrasi Dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta, Reinka Cipta, 39.
- Mariam, B. (1977). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramdeia Pustaka Utama. 124.
- Muhammad, S.H. (2023). Partisipasi Politik Generasi Muda Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Jurnal Administrasi Pemerintah Desa, 4, 2, 15. <https://share.google/gGoDfO52ZyV4nqsbe>
- Muhammad, Z. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 74.
- Muhammad, Z. (2022). Islam Dan Demokrasi: Telaah Implementasi Demokrasi di Indonesia. Jurnal Ulul Albab, 4, (2), 14.
- Rahadi, B.P & P. Arlis. (2023). Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Peaktik. Sleman, Cv Budi Utama, 7.
- Robert, A.D. (1982). Dilemmas Of Pluralist Democracy: Autonomy Vs Contraol. AS, Yale University, 103.
- Sunarso. (2015). Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implemetasinya di Indonesia. Yogyakarta, UNY Press, 72.
- Surya, M.N. (2019). Demokrasi Dan Tantangannya Dalam Bingkai Pluralisme di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 19, (1), 17. <https://share.google/h8PB7R1UKumR1imww>
- Wili, M.C.N. (2024). Indeks Demokrasi Turun: Kebebasan Pers Turut Terancam. 3-4. <https://share.google/Lh1d2uWI3ICWt9ibE>
- Yalvema, M. (2012). Partisipasi Politik Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru Dan Reformasi. Padang, UNP Press. 20.